

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09 Telp. 0351 - 749198 Faks. 0351 - 749078 Email: pendidikan@ngawikab.go.id

Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

IZIN OPERASIONAL Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 400. 3.3/1431.6/ 404. 301/ 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 diberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

AL AZHAR

Alamat

: Jln. Imam Bonjol No 09 RT 03 RW 03

Dsn Wates Ds. Dawu,

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi

NPSN

Tanggal Berdiri

: 09 Agustus 2023

Notaris

: NAFIATURROHMAN, SH, M.Kn

Tanggal Notaris

: 09 Agustus 2023

No Notaris

78

Akreditasi

Izin Operasional ini berlaku sejak 02 Oktober 2023 sampai dengan 01 Oktober 2026.

Ngawi, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATEN NGAWI

MARSONO, SH, M Si

Pembina TKI

NIP. 19690705 199003 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09 Telp. 0351 - 749198 Faks. 0351 - 749078

Email: pendidikan@ngawikab.go.id Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI Nomor: 400.3.3/ 1431.6 /404.301/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL AZHAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang

- Bahwa mendasar Surat Keputusan Kepala Dinas : a. Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Nomor: 400.3.3/1376.13/404.301/2023, Tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR, maka perlu diterbitkan izin Operasional dari Lembaga tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
 - bahwa mendasar Laporan Hasil Pemeriksaan Izin PKBM yang dilakukan oleh Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Nomor:400.3.3/ 1302.5/404.301/2023 Tanggal: 18 September 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamalkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2. Pemerintah Daerah;
- Undang undang no 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
- Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peneyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Nomor: 400.3.3/1430.4/ 404. 301/ 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

AL AZHAR

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT (PKBM) AL AZHAR

Alamat

: Jln. Imam Bonjol No. 09 RT 03 RW 03

Dsn. Wates Ds. Dawu Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi

NPSN

Tanggal Berdiri : 09 Agustus 2023

Akta Notaris

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT (PKBM) AL AZHAR

Notaris

: NAFIATURROHMAN, SH, M.Kn

Tanggal Notaris : 09 Agustus 2023

No Notaris

Akreditasi

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2023

sampai dengan 01 Oktober 2026.

KETIGA

: Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Ngawi : 02 Oktober 2023 Tanggal KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN WABUPATEN NGAMI

SUMARSONO, S.H., M.SI Pembina Tingkat I

DINAS

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Paron

2. Arsip